

## 81 Tahun Pasca Pertempuran Okinawa: Menguji Ulang Warisan Dominasi Maritim Amerika dalam Kontestasi Indo-Pasifik

suryawiranto.id

Delapan puluh satu tahun setelah Pertempuran Okinawa, refleksi atas peristiwa tersebut tidak lagi memadai jika hanya diletakkan dalam bingkai historiografis. Ia harus dibaca sebagai teks strategis yang hidup, sebuah preseden empiris atas tesis klasik Alfred Thayer Mahan mengenai *sea power* sebagai determinan utama dalam konfigurasi kekuasaan global. Okinawa bukan sekadar kemenangan militer, melainkan artikulasi paling brutal dari logika dominasi maritim: kontrol atas jalur laut, supremasi proyeksi kekuatan, dan kemampuan mempertahankan *sea lines of communication* (SLOC) sebagai fondasi hegemoni.

Namun, dalam lanskap geopolitik kontemporer, pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah warisan tersebut masih dikenang, melainkan apakah ia masih operasional. Jawabannya tidak hanya afirmatif, tetapi juga eksponensial. Kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok sebagai kekuatan maritim revisionis telah mentransformasikan Indo-Pasifik dari ruang interdependensi menjadi arena kompetisi strategis terbuka. Modernisasi agresif *People's Liberation Army Navy*, pembangunan pulau buatan yang termiliterisasi di Laut China Selatan, serta penggunaan taktik *gray zone* di sekitar Taiwan dan Filipina menunjukkan bahwa Beijing tidak sekadar mengejar keseimbangan, melainkan redefinisi aturan main.

Dalam konteks ini, dominasi yang pernah dikonsolidasikan oleh *United States Navy* pasca-Perang Dunia II kini menghadapi tekanan struktural. Strategi *anti-access/area denial* (A2/AD) yang dikembangkan Beijing secara sistematis mengikis keunggulan tradisional Amerika dalam proyeksi kekuatan. Sementara itu, intensifikasi latihan blokade dan simulasi invasi terhadap Taiwan pada periode 2025–2026 menandai pergeseran dari *deterrence signaling* menuju *pre-conflict shaping*. Dalam kerangka ini, inisiatif seperti AUKUS dan *Quadilateral Security Dialogue* tidak dapat direduksi sebagai provokasi, melainkan harus dipahami sebagai mekanisme *balancing* yang inheren dalam sistem internasional anarkis.

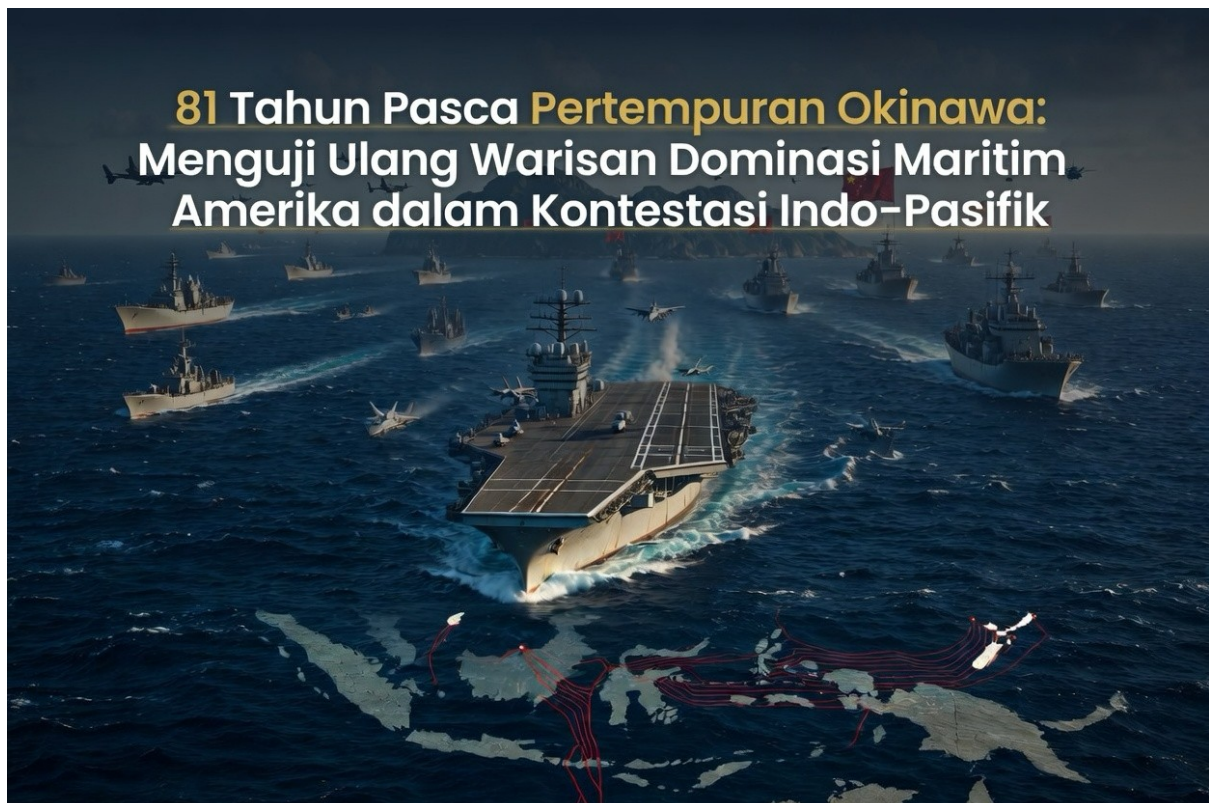
Lebih jauh, dinamika ini memperlihatkan bahwa Indo-Pasifik sedang bergerak menuju kondisi yang oleh Graham Allison disebut sebagai *Thucydides Trap*, sebuah situasi di mana kekuatan dominan dan kekuatan penantang terjebak dalam spiral konflik yang hampir tak terelakkan. Dalam situasi demikian, pelajaran Okinawa menjadi semakin relevan: supremasi maritim tidak pernah bersifat statis, melainkan hasil dari investasi berkelanjutan dalam kesiapan tempur, inovasi doktrinal, dan keunggulan teknologi.

Bagi Indonesia, implikasinya bersifat eksistensial. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menguasai simpul kritis SLOC global, posisi geostrategis Indonesia bukan sekadar aset, melainkan juga kerentanan. Visi Poros Maritim Dunia harus direkalibrasi dari paradigma pembangunan menuju paradigma kekuatan. Ini berarti transformasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menjadi kekuatan *sea denial* yang kredibel, penguatan interoperabilitas dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, serta reposisi diplomasi luar negeri dari *normative neutrality* menuju *strategic hedging* berbasis kapabilitas.

Namun, refleksi ini juga harus jujur terhadap realitas bahwa Amerika Serikat sendiri menghadapi tekanan internal: polarisasi politik domestik, keterbatasan fiskal, serta kebutuhan untuk mengelola kompetisi simultan di berbagai teater. Jika komitmen *forward presence* di Pasifik Barat melemah, maka kekosongan strategis akan segera diisi oleh aktor revisionis. Dalam konteks ini, ketergantungan pasif bukan lagi pilihan rasional bagi negara-negara kawasan.

Oleh karena itu, peringatan 81 tahun Pertempuran Okinawa harus dimaknai sebagai *strategic inflection point*. Ia menegaskan satu premis fundamental: dominasi maritim bukanlah warisan yang diwariskan, melainkan kapasitas yang harus diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus. Bagi Indonesia, ini adalah panggilan untuk membangun *strategic agency* yang otonom, di mana kekuatan laut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertahanan, tetapi sebagai alat pembentuk tatanan regional.

Pada akhirnya, sejarah Okinawa mengajarkan sebuah kebenaran yang tidak lekang oleh waktu: dalam politik kekuasaan maritim, legitimasi tidak ditentukan oleh retorika, melainkan oleh kesiapan. Di tengah turbulensi geopolitik 2026, pilihan bagi Indonesia bukan lagi antara terlibat atau tidak, melainkan antara menjadi subjek strategis atau sekadar objek dari konfigurasi kekuatan yang dibentuk oleh pihak lain.



Delapan puluh satu tahun setelah Pertempuran Okinawa, peristiwa tersebut bukan sekadar catatan sejarah, melainkan pelajaran strategis hidup tentang *sea power* ala Alfred Thayer Mahan. Okinawa membuktikan bahwa dominasi maritim, kontrol jalur laut, proyeksi kekuatan, dan pengamanan SLOC, menjadi fondasi hegemoni global.

Kini, kebangkitan China sebagai kekuatan maritim revisionis melalui modernisasi PLAN, pulau buatan di LCS, dan taktik *gray zone* mengancam supremasi Amerika. Strategi A2/AD Beijing serta tekanan di Taiwan menandai *Thucydides Trap*, di mana *balancing* seperti AUKUS dan Quad menjadi respons alamiah.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, ini panggilan eksistensial: Poros Maritim Dunia harus bertransformasi dari pembangunan menjadi kekuatan *sea denial* yang kredibel, melalui penguatan TNI AL, interoperabilitas dengan mitra strategis, dan *strategic hedging*. Dominasi maritim bukan warisan statis, melainkan kapasitas yang terus diproduksi. Di 2026, Indonesia harus memilih menjadi subjek strategis, bukan objek kekuatan asing.

suryawiranto.id